



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 dan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

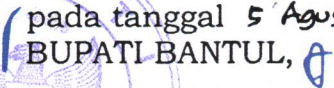
BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2024
BUPATI BANTUL, 

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

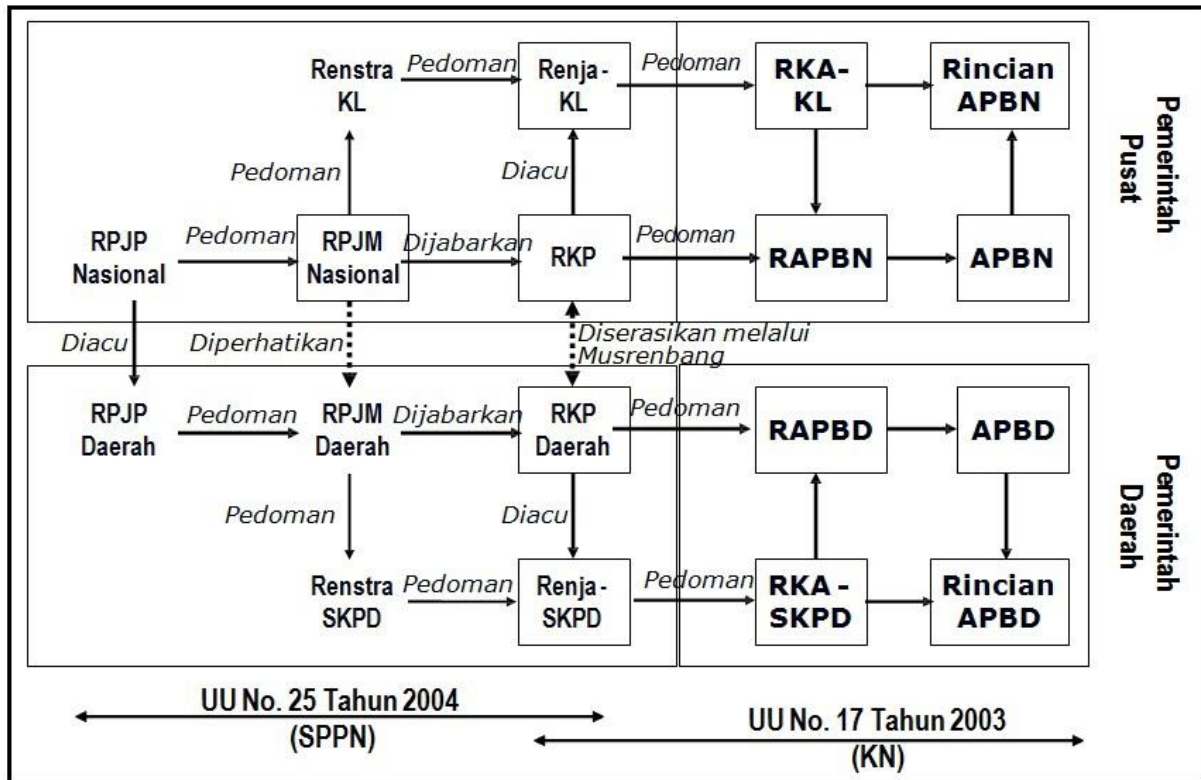
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Sekretariat DPRD. Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Tahun 2025 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2025.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan,
- Penyusunan rancangan awal,
- Penyusunan rancangan,
- Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- Perumusan rancangan akhir, dan
- Penetapan.

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 Tetang Rancangan RKP Tahun 2025

- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 48);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 Tentang RKPD Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
- 2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023,
2. evaluasi Tahun 2023 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2022 dan perkiraan realisasi Tahun 2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2023. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan

Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (7/6)	-9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	85	84	84	83	99%	85 angka	167	196%
4.02.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	85	84	84	100	119%	85 persen	184	216%
4.02.01.2. 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	5	7	7	100%	5 dokumen	12	60%
4.02.01.2. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	6	6	6	100%	6 laporan	12	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (7/6)	-9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85	84	84	100	119%	85 persen	184	216%
4.02.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156	14	39	39	100%	39 orang/ bln	53	34%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48		12	12	100%	12 dokumen	12	25%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	84		21	21	100%	21 laporan	21	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (7/6)	-9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85	84	84	98,44	117%	85 persen	182,44	215%
4.02.01.2. 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160	10	128	126	98%	40 orang	136	85%
4.02.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85	84	84	100	119%	85 persen	184	216%
4.02.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28	7	7	7	100%	7 paket	14	50%
4.02.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	2	2	2	100%	2 paket	4	50%
4.02.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	8	2	2	2	100%	2 dokumen	4	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (7/6)	-9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48		12	12	100%	12 laporan	12	25%
4.02.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	12	12	12	100%	12 laporan	24	50%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48		12	12	100%	12 dokumen	12	25%
4.02.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85	84	84	100	119%	85 persen	184	216%
4.02.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	4000	12	12	100%	12 laporan	4012	8358%
4.02.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	12	12	12	100%	12 laporan	24	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (7/6)	-9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.01.2. 06.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48		12	12	100%	12 laporan	12	25%
4.02.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	12	12	12	100%	12 laporan	24	50%
4.02.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85	84	84	100	119%	85 persen	184	216%
4.02.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	4	4	4	100%	4 unit	8	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (7/6)	-9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	164	39	39	39	100%	41 unit	78	48%
4.02.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	4	20	20	100%	20 unit	24	120%
4.02.01.2. 09.10	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	6	1	6	6	100%	6 unit	7	117%
4.02.01.2. 15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	85	84	84	68,89	82%	85 persen	152,89	180%
4.02.01.2. 15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	360	14	14	14	100%	45 orang/ bln	28	8%
4.02.01.2. 15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	20	272	272	272	100%	5 paket	544	2720%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (7/6)	-9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.01.2. 15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	360	45	45	3	7%	40 orang	48	13%
4.02.01.2. 16	Layanan Administrasi DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD	85	84	84	100	119%	85 persen	184	216%
4.02.01.2. 16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48	96	12	12	100%	12 laporan	108	225%
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	90	82	84	83	99%	86%	165,86	184%
4.02.02.2. 01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	85	82	84	100	119%	85 persen	182	214%
4.02.02.2. 01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	24	5	6	6	100%	6 dokumen	11	46%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (7/6)	-9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.02.2. 01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	36	11	9	9	100%	9 dokumen	20	56%
4.02.02.2. 01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	20	4	4	4	100%	5 dokumen	8	40%
4.02.02.2. 01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterang an Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5	2	2	2	100%	5 dokumen	4	80%
4.02.02.2. 02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	85	82	84	100	119%	85 persen	182	214%
4.02.02.2. 02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	32	1	8	8	100%	8 dokumen	9	28%
4.02.02.2. 03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	85	82	84	100	119%	85 persen	182	214%
4.02.02.2. 03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	64	3	16	16	100%	16 dokumen	19	30%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (7/6)	-9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.02.2. 04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	85	82	84	89,81	107%	85 persen	171,81	202%
4.02.02.2. 04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	25	85	6	6	100%	7 dokumen	91	364%
4.02.02.2. 04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	164	108	5	3	60%	42 orang	111	68%
4.02.02.2. 04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	384	12	96	96	100%	96 orang	108	28%
4.02.02.2. 04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	528	38	132	131	99%	132 dokumen	169	32%
4.02.02.2. 05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	85	82	84	100	119%	85 persen	182	214%
4.02.02.2. 05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	16	3	4	4	100%	4 dokumen	7	44%
4.02.02.2. 06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	85	82	84	100	119%	85 persen	182	214%
4.02.02.2. 06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	4	1	1	1	100%	1 laporan	2	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (7/6)	-9	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.02.02.2. 08	Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	85	82	84	100	119%	85 persen	182	214%
4.02.02.2. 08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	80	20	20	20	100%	20 dokumen	40	50%
4.02.02.2. 08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	4	1	1	1	100%	1 laporan	2	50%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	16		4	4	100%	4 dokumen	4	25%
4.02.02.2. 08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	240	60	60	60	100%	60 dokumen	120	50%

Keterangan:

*) (10)=(5+7+9) jika kinerja output

(10)=(9) jika kinerja outcome

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapai
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapai
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapai
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapai
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapai
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tercapai
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tercapai
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai Sekretariat DPRD terdapat beberapa pegawai yang tidak dapat mengikuti kegiatan dikarenakan sakit atau alasan lain.
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai Sekretariat DPRD terdapat beberapa pegawai yang tidak dapat mengikuti kegiatan dikarenakan sakit atau alasan lain.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapai

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapai
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercapai
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tercapai
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercapai
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapai
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tercapai
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapai
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapai
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapai
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapai
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapai
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapai
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tercapai
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tercapai
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapai
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercapai

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Beberapa fasilitas anggota dewan yang wajib dianggarkan setiap tahun namun tidak digunakan oleh anggota dewan terutama medical check-up
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tercapai
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tercapai
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Dikarenakan anggota DPRD tidak mengambil fasilitas medical check-up ini sedangkan fasilitas ini harus selalu dianggarkan setiap tahunnya menurut aturan undang-undang
	Layanan Administrasi DPRD	Tercapai
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tercapai
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Secara umum, akibat relatif sulitnya menentukan volume perencanaan di DPA terutama pada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan fasilitasi kegiatan dewan. Pada level nasional pun tidak terdapat standar maupun kerangka kebijakan Kementerian/ Lembaga terkait, yang dapat diacu baik dari sisi perencanaan, evaluasi, maupun pelaporan
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tercapai
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tercapai
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tercapai
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Tercapai
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Tercapai

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tercapai
	Pembahasan APBD	Tercapai
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tercapai
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Tercapai
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kinerja kegiatan ini tidak tercapai terutama karena capaian penyediaan kelompok pakar dan tim ahli yang rendah
	Pendalaman Tugas DPRD	Tercapai
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Harus dianggarkan karena amanat undang-undang namun pimpinan dan alat kelengkapan dewan belum mengehendaki adanya pengadaan tim pakar dan tim ahli lagi
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tercapai
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyediaan hadiah untuk kegiatan Bantul Expo tidak jadi terlaksana
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tercapai
	Pelaksanaan Reses	Tercapai
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Tercapai
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Tercapai
	Fasilitasi Tugas DPRD	Tercapai
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Tercapai
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tercapai
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Tercapai
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Tercapai

2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	tidak tercapai
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kerjasama yang baik seluruh jajaran Sekretariat DPRD dalam menentukan perencanaan kebutuhan anggaran serta evaluasi kegiatan secara periodik.
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ketegasan jajaran pimpinan OPD dalam memutuskan sub. kegiatan yang akan diambil dalam perubahan renstra
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi antar kepala bagian dan kepala OPD lebih baik
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Merupakan kegiatan rutin yang jumlah volume serta anggaran kebutuhan dapat ditentukan dengan cukup jelas
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kegiatan rutin serta didukung sistem yang sudah terintegrasi dan lancarnya komunikasi dengan BPKPAD
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun serta didukung koordinasi yang baik dari para pemangku kebijakan.
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun serta didukung koordinasi yang baik dari para pemangku kebijakan.
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tidak tercapai

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	tidak tercapai
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyesuaian kebutuhan dan target kegiatan pada DPA perubahan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SDM yang baik dan koordinasi yang baik dengan internal maupun eksternal Setwan khususnya pihak ketiga.
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun serta didukung koordinasi yang baik dari para pemangku kebijakan.
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyesuaian kebutuhan dan target kegiatan pada DPA perubahan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Perencanaan yang baik serta merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perencanaan yang baik serta merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Perencanaan yang baik serta merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan yang baik serta merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perencanaan yang baik serta merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perencanaan yang baik serta merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan dan analisis kebutuhan yang baik

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SDM yang baik, perencanaan yang matang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan identifikasi kebutuhan pemeliharaan yang akurat terutama pada kendaraan dinas dan pemeliharaan gedung Sekwan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perencanaan dan koordinasi yang baik dari para pengampu kegiatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perencanaan dan koordinasi yang baik dari para pengampu kegiatan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perencanaan dan analisis kebutuhan yang baik
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perencanaan dan koordinasi yang baik dari para pengampu kegiatan
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	tidak tercapai
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Administrasi yang baik oleh pengelola gaji dewan
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pemilihan Rekanan yang lebih baik dan kooperatif
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	tidak tercapai
	Layanan Administrasi DPRD	Perencanaan yang baik serta merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Perencanaan dan analisis kebutuhan yang baik didasarkan pada realisasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	tidak tercapai

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan semua stakeholder kegiatan pembentukan peraturan daerah baik di internal maupun eksternal Sekretariat DPRD
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SDM yang baik dan adanya materi hukum yang cukup dan mendukung
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan dan OPD terkait serta adanya materi yang cukup dan mendukung
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan dan SDM yang baik
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	SDM yang baik dan adanya materi hukum yang cukup dan mendukung
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan dan OPD terkait
	Pembahasan APBD	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan dan OPD terkait
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan yang difasilitasi serta dengan OPD terkait
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan dan OPD terkait
	Peningkatan Kapasitas DPRD	tidak tercapai
	Pendalaman Tugas DPRD	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	tidak tercapai
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Koordinasi dan SDM yang baik
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	tidak tercapai

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Perencanaan matang terkait kebutuhan meres berdasarkan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya dan koordinasi yang baik dengan anggota dewan
	Pelaksanaan Reses	Perencanaan matang terkait kebutuhan meres berdasarkan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya dan koordinasi yang baik dengan anggota dewan
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Tidak ada banyak perubahan aturan tentang kode etik DPRD serta Koordinasi yang baik dengan anggota dewan
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Tidak ada banyak perubahan aturan tentang kode etik DPRD serta Koordinasi yang baik dengan anggota dewan
	Fasilitasi Tugas DPRD	Perencanaan kebutuhan yang baik didasarkan pada realisasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya serta koordinasi dengan anggota dewan berjalan baik
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Perencanaan dan analisis kebutuhan yang baik didasarkan pada realisasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Koordinasi yang baik dengan anggota dewan
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Koordinasi yang baik dengan pimpinan dewan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2025 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja

program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan, khususnya dengan anggota Dewan terkait rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang, sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, terukur, dan efektif;
2. Lebih mengoptimalkan fungsi Asdeski (Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia) sebagai wahana komunikasi antar Sekretariat DPRD seluruh Indonesia.
3. Meningkatkan kesadaran dan komitmen semua pemangku kepentingan terhadap tugas dan kewajiban sehingga semua program kegiatan pada tahun mendatang dapat terlaksana sesuai target;
4. Optimalisasi fungsi perencanaan, monitoring, dan evaluasi penganggaran setiap kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul agar capaian kinerja dan keuangan maksimal.
5. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Target			Catatan Analisis
			Target	Realisasi	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	92,31%	74%	91,67%	76%	78%	80%	Realisasi Raperda yang disetujui bersama mencapai 11 raperda dari target 12 raperda. Satu raperda ditunda/belum dapat terselesaikan karena Belum selesai (baru dilakukan pembahasan (Pembicaraan Tingkat I) (masih ada materi yg perlu didiskusikan)

Sesuai pencapaian IKU Sekretariat DPRD Tahun 2023 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU Sekretariat DPRD yang dapat memenuhi target adalah Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama. IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. kinerja yang baik dari Sekretariat DPRD dari mulai perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi setiap program dan kegiatan;
- b. komitmen seluruh pegawai Sekretariat DPRD, pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan kegiatan yang telah tersusun;
- c. koordinasi dan kerja sama yang baik dengan internal maupun eksternal Sekretariat DPRD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Administrasi Pemerintahan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen yang tinggi dari ASN Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya	ASN yang mempunyai kapasitas dalam operasional aplikasi/untuk input data terbatas.
Dukungan sarana dan prasarana yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD	Semakin berkurangnya jumlah ASN yang memiliki sertifikasi barang dan jasa.
Dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat fraksi	Pelaksanaan kegiatan Badan Musyawarah DPRD tidak sesuai dengan ROPK yang telah disusun
Adanya koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait	Terbatasnya ASN Sekretariat DPRD dengan sertifikasi penyusunan perancang perundang-undangan.

Selain itu, selama Tahun 2023 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Peluang	Tantangan
Adanya perubahan regulasi yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul sehingga	Kemajuan digital menuntut ASN harus mengikuti perkembangan digitalisasi untuk mempercepat kinerja pelayanan kepada masyarakat
Diundangkannya Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2023	Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan

Peluang	Tantangan
Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regiona	daerah karena menyesuaikan perubahan peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat.
Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD	
Dicabutnya pembatasan (PPKM) akibat covid-19 oleh Pemerintah Pusat memberikan peluang pelaksanaan kegiatan lebih lancar.	Makin tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan profesionalisme anggota dewan maupun aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka strategi pada Tahun 2025 yang akan dilakukan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program dan kegiatan, terutama menyikapi dinamisnya kegiatan anggota dewan.
2. Penyusunan standar kinerja yang realistis dan terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
3. Efisiensi penggunaan anggaran, terkait dengan program Pemerintah Daerah untuk mengurangi defisit anggaran sehingga harus diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
4. Optimalisasi pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	42.514.162.091	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	37.916.205.918,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	85 persen	67.881.000	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	85 persen	56.100.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	33.940.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	28.050.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	33.940.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	28.050.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah	85 persen	5.528.244.155	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah	85 persen	6.366.978.001,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang /bln	5.250.766.548	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang /bln	6.205.308.001,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	247.227.607	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	133.620.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21 laporan	30.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21 laporan	28.050.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85 persen	240.378.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85 persen	291.566.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	240.378.600	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	291.566.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85 persen	2.826.605.536	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85 persen	1.994.466.518,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	1.275.253.660	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	1.083.989.294,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	199.802.224	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	55.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	140.553.600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	70.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	60.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	125.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	1.090.996.052	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	651.477.224,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	60.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	9.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 persen	1.195.559.801	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 persen	1.788.338.160,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	53.240.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	60.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	47.916.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	18.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	205.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	133.110.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	889.403.801	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.577.228.160,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 persen	2.011.769.457	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 persen	1.193.055.979,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	353.626.735	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	320.447.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	525.405.595	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	562.516.800,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	238.342.702	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	23.865.100,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	894.394.425	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	286.227.079,00	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	85 persen	30.190.892.772	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	85 persen	25.632.108.592,00	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 orang /bulan	29.597.033.847	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 orang /bulan	25.023.928.592,00	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 paket	504.016.425	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 paket	540.680.000,00	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	89.842.500	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	67.500.000,00	
	Layanan Administrasi DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD	85 persen	452.830.770	Layanan Administrasi DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD	85 persen	593.592.668,00	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 laporan	452.830.770	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 laporan	593.592.668,00	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab. Bantul	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	88%	8.316.640.457	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab. Bantul	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	88%	26.887.403.500,00	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	85 persen	2.447.885.742	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	85 persen	6.452.233.000,00	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 dokumen	813.897.723	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 dokumen	3.022.322.000,00	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 dokumen	1.385.910.705	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 dokumen	3.042.840.500,00	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	232.149.740	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	250.000.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 dokumen	15.927.574	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 dokumen	137.070.500,00	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	85 persen	914.517.737	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	85 persen	4.520.841.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pembahasan APBD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	8 dokumen	914.517.737	Pembahasan APBD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	8 dokumen	4.520.841.000,00	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	85 persen	1.885.261.867	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	85 persen	4.599.991.000,00	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	16 dokumen	1.885.261.867	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	16 dokumen	4.599.991.000,00	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	85 persen	927.543.190	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	85 persen	3.684.950.000,00	
	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	508.629.378	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	2.350.540.000,00	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Bantul	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	42 orang	9.461.319	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Bantul	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	42 orang	100.000.000,00	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	96 orang	116.875.117	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	96 orang	255.750.000,00	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	132 dokumen	292.577.376	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	132 dokumen	978.660.000,00	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	85 persen	597.264.462	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	85 persen	1.470.125.000	
	Pelaksanaan Reses	Kab. Bantul	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	4 dokumen	597.264.462	Pelaksanaan Reses	Kab. Bantul	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	4 dokumen	1.470.125.000,00	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	85 persen	201.745.931	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	85 persen	833.268.000,00	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 laporan	201.745.931	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 laporan	833.268.000,00	
	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	85 persen	1.342.421.528	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	85 persen	5.325.995.500,00	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20 dokumen	821.073.577	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20 dokumen	3.128.489.000,00	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	5.913.324	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	231.200.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 dokumen	337.048.915	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 dokumen	1.389.940.000,00	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60 dokumen	178.385.712	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60 dokumen	576.366.500,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2025 serta tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2025 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
- PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
- PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
- PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
- PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

- PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
- PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025 dan prioritas nasional tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas baik ASN maupun anggota DPRD perlu ditingkatkan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul untuk membekali anggota DPRD dan ASN dalam mengikuti tuntutan perubahan sesuai perkembangan lingkungan strategis DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul.
2. Monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan secara disiplin. Jika dalam proses pelaksanaan terjadi efisiensi anggaran, maka perlu dilihat kembali kegiatan yang dinilai kurang prioritas. Anggaran pada kegiatan tersebut kemudian dialihkan untuk pelaksanaan kegiatan yang prioritas.
3. Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan Anggota DPRD harus berpijak pada aturan-aturan pengelolaan anggaran yang berlaku. Pengelolaan anggaran perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat maupun BPKP.
4. Sehubungan dengan kebijakan gender yang ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program pembangunan termasuk di daerah, maka kebijakan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD baik yang terkait kegiatan Pembangunan fisik maupun non fisik pada tahun 2025 dan seterusnya akan memperhatikan prinsip ini. Unsur-unsur masyarakat seperti perempuan, disabilitas, masarakat miskin, anak-anak, dan kelompok

marjinal perlu ditingkatkan peran sertanya baik sebagai objek maupun subjek dari program dan kegiatan DPRD Kabupaten Bantul.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Tahun 2025 dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah" dengan Prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
2. Pemerataan kualitas infrastruktur.
3. Peningkatan SDM berdaya saing.
4. Pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.
5. Pemantapan layanan publik berbasis informasi teknologi.
6. Pengembangan kawasan pansela dan kawasan industri piyungan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
				Tahun 2022	Tahun 2023		
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Prosentase raperda yang disetujui bersama	92,31 %	91,67 %	100 %	78 %

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				64.803.609.418,00		56.267.820.548,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				64.803.609.418,00		56.267.820.548,00
4	02				SEKRETARIAT DPRD				64.803.609.418,00		56.267.820.548,00
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		85 Angka	37.916.205.918,00	85 Angka	46.287.569.645,00
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		85 Persen	56.100.000,00	85 Persen	74.669.100,00
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	5 Dokumen	28.050.000,00	5 Dokumen	37.334.550,00
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	6 Laporan	28.050.000,00	6 Laporan	37.334.550,00
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Persen	6.366.978.001,00	85 Persen	5.667.396.266,00
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	39 Orang/bulan	6.205.308.001,00	39 Orang/bulan	5.297.834.548,00
4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12 Dokumen	133.620.000,00	12 Dokumen	336.286.718,00
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	21 Laporan	28.050.000,00	21 Laporan	33.275.000,00
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		85 Persen	291.566.000,00	85 Persen	264.416.460,00
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	40 Orang	291.566.000,00	40 Orang	264.416.460,00
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		85 Persen	1.994.466.518,00	85 Persen	3.092.277.918,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4	02	01	2.0 6	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	7 Paket	1.083.989.294,00	7 Paket	1.402.779.027,00
4	02	01	2.0 6	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	2 Paket	55.000.000,00	2 Paket	219.782.446,00
4	02	01	2.0 6	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	2 Dokumen	70.000.000,00	2 Dokumen	154.608.960,00
4	02	01	2.0 6	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12 Laporan	125.000.000,00	12 Laporan	75.000.000,00
4	02	01	2.0 6	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12 Laporan	651.477.224,00	12 Laporan	1.165.107.485,00
4	02	01	2.0 6	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12 Dokumen	9.000.000,00	12 Dokumen	75.000.000,00
4	02	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		85 Persen	1.788.338.160,00	85 Persen	1.267.767.600,00
4	02	01	2.0 8	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12 Laporan	60.000.000,00	12 Laporan	58.560.000,00
4	02	01	2.0 8	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12 Laporan	18.000.000,00	12 Laporan	52.707.600,00
4	02	01	2.0 8	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12 Laporan	133.110.000,00	12 Laporan	242.500.000,00
4	02	01	2.0 8	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12 Laporan	1.577.228.160,00	12 Laporan	914.000.000,00
4	02	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		85 Persen	1.193.055.979,00	85 Persen	2.212.946.404,00
4	02	01	2.0 9	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	4 Unit	320.447.000,00	4 Unit	388.989.409,00
4	02	01	2.0 9	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	41 Unit	562.516.800,00	41 Unit	577.946.155,00
4	02	01	2.0 9	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	20 Unit	23.865.100,00	20 Unit	262.176.973,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4	02	01	2.0 9	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	6 Unit	286.227.079,00	6 Unit	983.833.867,00
4	02	01	2.1 5		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		85 Persen	25.632.108.592,00	85 Persen	33.209.982.050,00
4	02	01	2.1 5	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	45 Orang/Bulan	25.023.928.592,00	45 Orang/Bulan	32.556.737.232,00
4	02	01	2.1 5	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	5 Paket	540.680.000,00	5 Paket	554.418.068,00
4	02	01	2.1 5	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	45 Orang	67.500.000,00	45 Orang	98.826.750,00
4	02	01	2.1 6		Layanan Administrasi DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD		85 Persen	593.592.668,00	85 Persen	498.113.847,00
4	02	01	2.1 6	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12 Laporan	593.592.668,00	12 Laporan	498.113.847,00
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama		88 Persen	26.887.403.500,00	90 Persen	9.980.250.903,00
4	02	02	2.0 1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		85 Persen	6.452.233.000,00	85 Persen	2.937.545.996,00
4	02	02	2.0 1	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	6 Dokumen	3.022.322.000,00	6 Dokumen	976.704.900,00
4	02	02	2.0 1	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	9 Dokumen	3.042.840.500,00	9 Dokumen	1.663.139.895,00
4	02	02	2.0 1	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	4 Dokumen	250.000.000,00	4 Dokumen	278.587.571,00
4	02	02	2.0 1	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	5 Dokumen	137.070.500,00	5 Dokumen	19.113.630,00
4	02	02	2.0 2		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Persen	4.520.841.000,00	85 Persen	1.097.452.333,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4	02	02	2.0 2	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	8 Dokumen	4.520.841.000,00	8 Dokumen	1.097.452.333,00
4	02	02	2.0 3		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		85 Persen	4.599.991.000,00	85 Persen	2.262.378.246,00
4	02	02	2.0 3	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	16 Dokumen	4.599.991.000,00	16 Dokumen	2.262.378.246,00
4	02	02	2.0 4		Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD		85 Persen	3.684.950.000,00	85 Persen	1.113.083.319,00
4	02	02	2.0 4	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	6 Dokumen	2.350.540.000,00	6 Dokumen	610.372.522,00
4	02	02	2.0 4	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	42 Orang	100.000.000,00	42 Orang	11.353.904,00
4	02	02	2.0 4	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	96 Orang	255.750.000,00	96 Orang	140.254.108,00
4	02	02	2.0 4	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	132 Dokumen	978.660.000,00	132 Dokumen	351.102.785,00
4	02	02	2.0 5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat		85 Persen	1470125000	85 Persen	716.737.632,00
4	02	02	2.0 5	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	4 Dokumen	1.470.125.000,00	4 Dokumen	716.737.632,00
4	02	02	2.0 6		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD		85 Persen	833.268.000,00	85 Persen	242.101.967,00
4	02	02	2.0 6	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1 Laporan	833.268.000,00	1 Laporan	242.101.967,00
4	02	02	2.0 8		Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD		85 Persen	5.325.995.500,00	85 Persen	1.610.951.410,00
4	02	02	2.0 8	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	20 Dokumen	3.128.489.000,00	20 Dokumen	985.316.168,00
4	02	02	2.0 8	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1 Laporan	231.200.000,00	1 Laporan	7.096.190,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	4 Dokumen	1.389.940.000,00	4 Dokumen	404.470.141,00
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	60 Dokumen	576.366.500,00	60 Dokumen	214.068.911,00
					TOTAL				64.803.609.418,00		56.267.820.548,00

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul, *y*,



PRAPTA NUGRAHA, S.Sos., MH.
NIP. 197112171991011001